

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Penerimaan dan Pengabulan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, idealnya dicantumkan di dalamnya klausula pilihan forum sebagai media penyelesaian persoalan/ sengketa yang timbul dalam perjanjian tersebut yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda.

Jika kedua belah pihak telah memilih cara penyelesaian dengan arbitrase maka berlakulah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan pada saat yang bersamaan pengadilan Negara menjadi tidak berwenang secara absolut terhadap sengketa tersebut seiring para pihak telah memilih forum tertentu.¹ Begitu pula dalam perjanjian tentang ekonomi syariah dapat diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang telah memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai media penyelesaian sengketanya adalah PT. Atriumasta Sakti dan PT. Bank Syariah Mandiri. Dalam kasus antara PT. Atriumasta Sakti melawan PT. Bank Syariah Mandiri telah diselesaikan oleh Badan Arbitrase

¹ Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan: *pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*

Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 16 September 2009 No. 16/Th 2008/ Basyarnas.

Majelis arbitrase Basyarnas pada tanggal 16 September 2009 telah membacakan Putusan Perkara No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara:

PT. ATRIUMASTA SAKTI, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan dan berkantor di Taman Gandaria Valley Estate Blok A. I, RT 012, RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Melawan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Gedung Bank Syari'ah Mandiri Jalan MH, Thamrin No. 5, Jakarta.

Kemudian Putusan tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Akte Pendaftaran No.01/BASYARNAS/ 2009/PAJP tertanggal 12 Oktober 2009. Adapun amar putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka. Jak, selengkapnya adalah sebagai berikut: ²

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon melakukan cidera janji;

² Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 3-5

3. Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan *Murabahah* No.53 tanggal 23 Februari yang dibuat oleh dan di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menghukum Termohon (**PT. BANK SYARIAH MANDIRI**) untuk mengembalikan kepada Pemohon (**PT. ATRIUMASTA SAKTI**) dana sebesar Rp.878.791.366,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pembayaran biaya provisi Bank sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai fasilitas pembiayaan yang berjumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) karena Akad *Murabahah* No.53 dinyatakan batal demi hukum;
 - b. Pembayaran uang asuransi proyek (PT. Asuransi Dayin Mitra) sebesar Rp.45.027.000,- (empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu Rupiah);
 - c. Pembayaran uang muka iuran Jamsostek sejumlah Rp.5.962.700,- (lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah);
 - d. Pembayaran uang retribusi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.298.135.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
 - e. Uang pengembalian cicilan sejumlah Rp.179.666.666,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah).

5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya-biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti-bukti tersebut maupun mengenai besarnya biaya;
6. Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis dibacakan.
7. Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu atau dari Pemohon atau dari Termohon.
8. Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis ditanggung oleh Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
9. Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan.
10. Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom).
11. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apapun.

12. Menolak tuntutan Pemohon selebihnya.
13. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
14. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari biaya perkara ini.
15. Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan dibatalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi tertunda apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat mengajukan pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan menurunkan tingkat kesehatan PT. BANK SYARIAH MANDIRI dan Bank Indonesia wajib berdasarkan kekuatan hukum putusan ini memenuhi permohonan Pemohon yang demikian itu.
16. Memerintahkan kepada Sekretaris Sidang selaku Kuasa Arbiter untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.08 Tanggal 10 Oktober 2008.

Terhadap putusan Basyarnas di atas telah dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2009 dengan dasar ketentuan pasal 70 dan penjelasan umum bab VII Undang-Undang No. 30

Tahun 1999, jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Permohonan pembatalan putusan Basyarnas tersebut terdaftar dalam perkara No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP, antara:

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Gedung Bank Syariah Mandiri Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Iyan Risyadi Riksan, SH. Heri Bertus S. Hartojo, SH., MH. dan Muhammad Bastian, SH., para advokat yang tergabung pada DIAS dan Associates Low Office yang berkantor di Citylofs Sudirman Tower lantai 7 unit 729, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;-

Melawan

- I. MAJELIS ARBITER BASYARNAS, yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak atas nama Prof. H. Bismar Siregar, SH., Hj. Fatimah Achyar , SH. Dan Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH. Yang berkedudukan dan berkantor di Gedung MUI, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail , SH. LL.M, Dr. S. F. Merbun, SH., MH., M. Rudjito, SH.,MH., Dasril Effendi, SH., MH., Syahril Zainuddin, SH., Masayun Donny Kertopati, SH. dan Ilham Nur Akbar, SH. para advokat dan konsultan Hukum pada Maqdir Ismail dan Partners Law Firm, yang beralamat di Jl. Bandung No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON I”**;
- II. PT. ATRIUMASTA SAKTI, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan dan berkantor di Taman Gandaria Valley Estate blok A I., RT 012 RW. 005, kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Iran Syahril Siregar, SH., MH., Hendra K. Siregar, SH., Rendy Tanamo, SH. dan Azis Yanuar, SH., MH. para advokat yang tergabung pada Firma Hukum H.I Siregar dan Rekan yang beralamat di Gedung Setia Budi Atrium Lantai 2 Ruang 209, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON II”**;

Fakta persidangan mengungkapkan bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon (**PT. Bank Syariah Mandiri**) mengajukan permohonan pembatalan putusan Basyarnas tersebut karena:³

1. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
2. Isi amar putusan secara substansi tidak logis yuridis dan bertentangan satu sama lain.
3. Isi amar putusan tidak dapat lagi menjadi rujukan dalam pelaksanaan isi putusan dan bertentangan dengan sifat *final and binding* dari putusan arbitrase.
4. Isi amar putusan telah mereduksi dan/atau menghilangkan hak-hak pemohon yang dijamin undang-undang.
5. Isi amar putusan melanggar ketentuan undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (uu arbitrase).

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1430, Pengadilan Agama Jakarta Pusat membacakan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:⁴

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon I⁵ dan Termohon II⁶ seluruhnya;-

³ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 5- 15

⁴ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 75

⁵ MAJELIS ARBITER BASYARNAS, yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak atas nama Prof. H. Bismar Siregar, SH., Hj. Fatimah Achyar, SH. Dan Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH. Yang berkedudukan dan berkantor di Gedung MUI, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, SH. LL.M, Dr. S. F. Merbun, SH., MH., M. Rudjito, SH.,MH., Dasril Effendi, SH., MH., Syahrial Zainuddin, SH., Masayun Donny Kertopati, SH. dan Ilham Nur Akbar, SH. para advokat dan konsultan Hukum pada Maqdir Ismail dan Partners Law Firm, yang beralamat di Jl. Bandung No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON I**”;

DALAM POKOK PERKARA:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Membatalkan Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009 dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakatrtta Pusat sesuai akta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009 ;-
3. Menyatakan Putusan BASYARNAS No. 16/tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009 tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan hukum;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon II yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;-

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum amar putusan diatas adalah sebagai berikut:⁷

1. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan sengketa perbankan syariah yang menurut pasal 49 Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menentukan penyelesaian

⁶ PT. ATRIUMASTA SAKTI, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan dan berkantor di Taman Gandaria Velley Estate blok A I., RT 012 RW. 005, kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Iran Syahril Siregaer, SH., MH., Hendra K. Siregar, SH., Rendy Tanamo, SH. dan Azis Yanuar, SH., MH. para advokat yang tergabung pada Firma Hukum H.I Siregar dan Rekan yang beralamat di Gedung Setia Budi Atrium Lantai 2 Ruang 209, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON II**”;

⁷ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 58-67

sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Kalau kewenangan eksekusi atas putusan Basyarnas berdasarkan SEMA No. 8 Tahun 2008 dinyatakan sebagai wewenang Pengadilan Agama maka menurut logika Yuridis pembatalan putusan Basyarnas atas sengketa perbankan syariah harus menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dengan demikian kalimat Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 khusus yang berkaitan dengan Basyarnas harus dibaca Pengadilan Agama.
3. Majelis Arbiter Basyarnas harus dijadikan Termohon dalam perkara ini karena posita dalil Pemohon erat kaitannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Arbiter, oleh karenanya Eksepsi Termohon I,II ditolak.
4. Majelis berpendapat bahwa “ Tipu Muslihat” dalam Pasal 70 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dimaknai secara lebih luas dari berbagai perspektif baik Pidana, Perdata bahkan aspek syariah sehingga aspek syariah harus lebih diutamakan dan karenanya Tipu Muslihat didefinisikan sebagai “ Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain.
5. Perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Termohon II patut dikategorikan sebagai perbuatan “Tipu Muslihat” dan karenanya pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya dan karenanya

permohonan untuk membatalkan putusan Basyarnas tersebut dapat dikabulkan.

Dari beberapa pertimbangan hukum di atas, menurut pengamatan penulis, pertimbangan hukum tersebut di bagi pada dua aspek dalam hal esensial menyangkut kasus yang sedang dihadapi, yaitu:

1. Dasar hukum klaim kewenangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap putusan Basyarnas.

Pasal 49 Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. SEMA No. 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 khusus yang berkaitan dengan Basyarnas harus dibaca Pengadilan Agama.

2. Pertimbangan pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasioal yaitu karena dalam penilaian majelis hakim, majelis abiter "Tidak Jujur" yang menurut majelis hakim patut dikategorikan sebagai perbuatan "Tipu Muslihat".

Pasal 70 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Penerimaan dan Pengabulan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Putusan No. 792/PDT.G/2009/PA. Jakarta Pusat.

Dalam bagian ini penulis menkonsentrasikan analisisnya pada dua pertimbangan hukum yang cukup esensial dalam putusan pembatalan putusan badan arbitrase syariah nasional, yaitu:

1. Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Terkait dengan klaim kewenangan di atas, majelis hakim menimbang, bahwa tentang kenapa perkara ini (pembatalan putusan Basyarnas,*pen*) diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bunyi Pasal 71 dan 72 UU No. 30 tahun 1999 majelis hakim berpendapat sudah benar dan tepat, karena kecuali telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas majelis juga berpendapat jikalau tentang kewenangan eksekusi atas putusan Basyarnas sebagaimana diatur dalam pasal 60 sampai dengan 64 UU No. 30 tahun 1999 oleh Mahkamah Agung RI dengan surat edarannya nomor 08 Tahun 2008 dinyatakan sebagai wewenang Pengadilan Agama. Maka menurut logika yuridis segala sengketa tentang perbankan syari'ah termasuk pembatalan putusan BASYARNAS atas sengketa perbankan syari'ah harus pula menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dengan demikian kalimat *Pengadilan Negeri* yang termuat dalam

UU No. 30 tahun 1999, khusus yang berkaitan dengan BASYARNAS harus dibaca *Pengadilan Agama*.⁸

❖ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ص.م. يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثِ).

Artinya: Dari abu umamah al bahili r.a berkata . saya mendengar rosul saw berkata Sesungguhnya Allah telah memberikan hak hak kepada yang befirhak mendapatkannya .maka jangan berwasiat kepada yang bukan ahli warisnya.H.R ahmad dan ke empat imam kecuali nasai dan di perbagus oleh ahmat dan tirmidi dan di di perkuat huzaimah bin jarud.⁹

Siapapun mengakui akan posisi hakim sebagai aktor utama lembaga pengadilan, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Dalam tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena Pada hakikatnya *common law* adalah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh pengadilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim. Sistem hukum *common law* terikat oleh asas *stare decisis* ¹⁰ yakni asas yang menyatakan bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutuskan kemudian.

⁸ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 59.

⁹ Rowahu Ahmad Walarba' Alinsa'i Wakhasanah Ahmad Watar Midi, Waqowah Ibnu Huzaimah Bin Jarud *Balaqulimarom Sofakha*, h. 4. 220.

¹⁰ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 39

Dalam klaim kewenangan terhadap pembatalan putusan Basyarnas, majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mendasarkan kepada Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditafsirkan dengan dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Untuk menilai pertimbangan hukum majelis hakim di atas, maka terasa perlu untuk menyajikan dan mensejajarkan secara lengkap muatan-muatan dari Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 30 Tahun 1999 dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 serta Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar pertimbangannya.

a. Pasal 71 dan 72 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹¹¹⁰

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

¹¹ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Kemudian dalam penjelasan ayat (2) disebutkan:¹²

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbitrase yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa atau sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

b. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 yang berbunyi:^{13 12}

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah; dan
- i) ekonomi syariah.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a). bank syariah; b). lembaga keuangan mikro syariah. c). asuransi syariah; d.) reasuransi syariah; e). reksadana syariah; f). obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g). sekuritas syariah; h).

¹² Lihat penjelasan ayat (2) Pasal 72 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

pembiayaan syariah; i). pegadaian syariah; j). dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k). bisnis syariah.¹⁴

c. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak mensitir pasal tertentu dalam UU No. 21 Tahun 2008, akan tetapi penulis meyakini pasal yang dijadikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai sandaran pertimbangan hukumnya adalah Pasal 55 yang berbunyi:¹⁵

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

Ayat (2)

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Ayat (3)

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) adalah: Yang dimaksud dengan "*Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal

10 Oktober 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

¹⁴ Lihat penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Penting dicatat, Mahkamah Agung mendasarkan SEMA tersebut pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.¹⁶

Memperhatikan secara mendalam terhadap beberapa pasal dari beberapa peraturan Undang-Undang di atas yang dijadikan sandaran bagi majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyatakan dirinya berwenang terhadap pembatalan putusan Basyarnas, Pasal 71 dan 72 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebenarnya memuat dan mengatur perihal kewenangan absolut pengadilan umum terhadap pembatalan putusan badan arbitrase, dan menurut penulis adalah sangat keliru apabila pasal tersebut (Pasal 71 dan 72 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, karena kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 49 tersebut adalah kewenangan tentang sengketa ekonomi syariah semata yang di dalamnya juga termasuk sengketa perbankan syari'ah, yang tidak bersentuhan sama sekali dengan kewenangan pengadilan agama terhadap pembatalan putusan arbitrase syariah.

Selain hal di atas, juga sangat keliru apabila Pasal 71 dan 72 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁶ Lihat petunjuk No. 4 Surat Edaran Mahkamah Agung, RI (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebab dalam Pasal 55 tersebut diatas memuat kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa perbankan syari'ah seperti halnya Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan tidak menyinggung masalah arbitrase.

Sementara terkait dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa:

Jikalau tentang kewenangan eksekusi atas putusan **Basyarnas** sebagaimana diatur dalam pasal 60 sampai dengan 64 UU No. 30 tahun 1999 oleh Mahkamah Agung RI dengan surat edarannya Nomor 08 Tahun 2008 dinyatakan sebagai wewenang Pengadilan Agama. Maka menurut logika yuridis segala sengketa tentang perbankan syari'ah termasuk pembatalan putusan BASYARNAS atas sengketa perbankan syari'ah harus pula menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dengan demikian kalimat **Pengadilan Negeri** yang termuat dalam UU No. 30 tahun 1999, khusus yang berkaitan dengan BASYARNAS harus dibaca **Pengadilan Agama**.¹⁷

Dari segi waktu, bahwa SEMA. RI No. 8 Tahun 2008 dibuat dengan dasar pemikiran bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dibuat sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sehingga ditafsirkan bahwa frasa “**Pengadilan Negeri**” harus dibaca “**Pengadilan Agama**”; pembacaan frasa seperti ini pernah dinyatakan oleh Andi Syamsu Alam bahwa:¹⁸

Pendaftaran dan eksekusi sifatnya adalah hukum acara yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

¹⁷ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 59

¹⁸ Lihat Andi Syamsu Alam, *Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Dengan Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah*, makalah disampaikan Dalam Seminar Nasional Sosialisasi Undang-undang No. 21 Tahun 2009 Tentang Perbankan Syari'ah (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah) Kerjasama Program Studi Syari'ah FIAI UII dengan Mahkamah Agung RI pada hari Sabtu, 7 Februari 2009 di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, hal. 3

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum. Karena itu kata **Pengadilan Umum** pada hukum acara dimaksud harus dibaca **Pengadilan Agama**.

Logika yuridis “segala sengketa tentang perbankan syari’ah termasuk pembatalan putusan Basyarnas atas sengketa perbankan syari’ah harus pula menjadi wewenang Pengadilan Agama” yang disandarkan kepada pemahaman Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas tanggal 10 Oktober 2008, yang diungkapkan oleh majelis hakim, sebenarnya bisa diterima secara logika hukum, namun dalam konteks kasus ini, majelis hakim ternyata tidak cukup jeli dan cermat memperhatikan perkembangan hukum di negara ini, sebab pada tanggal 29 Oktober 2009,¹⁹ tiga belas hari (13) (Tanggal 10 November Tahun 2009) sebelum putusan Basyarnas tersebut dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh **PT. Bank Syariah Mandiri**, telah disahkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 59 ayat (3)nya menyatakan bahwa:²⁰

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Dalam penjelasan ayat (1) disebutkan bahwa:²¹

¹⁹ Lihat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

²⁰ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

²¹ Lihat penjelasan Pasal 59 aya (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Dari ketentuan Pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 ini jelas bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 ini jelas telah menganulir petunjuk-petunjuk dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 sehingga SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut telah kehilangan landasan hukumnya. Maka dengan demikian logika yuridis yang dibangun diatas SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut menjadi gugur seiring norma yang menjadi sandarannya telah gugur.

❖ الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ .

Artinya : Asal sesuatu kekal bagaimanapun keadaanya.²²

Lebih dari itu, majelis hakim seharusnya menolak secara absolut permohonan pembatalan putusan badan arbitrase syariah nasional tersebut, sebab ia tidak memiliki cukup dasar hukum dari segi apapun untuk mengklaim bahwa pembatalan putusan Basyarnas adalah kewenangannya kewenangan.

Kemudian hal di atas dipertegas dalam kesimpulan No. 4 (empat) dari Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Perdata Khusus pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat)

²² Kitab *Rowaidul Fiqiyah* Mualif Abdul/Hamid Hakim Sofah, h. 55.

Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”, dinyatakan bahwa SEMA No.8 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 bertentangan dengan Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut dinyatakan tidak berlaku.²³

Dari sini menjadi jelas bahwa pembatalan putusan lembaga arbitrase, baik putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maupun arbitrase-arbitrase lain, sesungguhnya merupakan kewenangan pengadilan negeri/umum sebagaimana dalam UU No. 30 Tahun 1999, dan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009, dan frasa “**arbitrase**” dalam UU No. 30 tahun 1999, menurut penulis sudah mencakup semua lembaga arbitrase yang ada di negara ini dan termasuk di dalamnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Apa yang penulis tuturkan di atas, mendapatkan legitimasi dari kesimpulan No. 1 (satu) Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Perdata Khusus Pada hari ini RABU tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

²³ Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Perdata Khusus Pada hari ini RABU tanggal 31 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”, hal. 3

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁴

Dari diskusi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *judex facti* (majelis hakim) telah salah menerapkan hukum sebagai dasar kewenangannya terhadap pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sehingga *judex facti* dapat dikatakan telah melampaui kompetensinya dalam menerima, memutus dan menyelesaikan pembatalan putusan Basyarnas.

2. Pertimbangan hukum pengabulan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu karena dalam penilaian majelis hakim, majelis arbitrase "**Tidak Jujur**" yang menurut majelis hakim patut dikategorikan sebagai perbuatan "**Tipu Muslihat**" sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Dalam bagian ini akan dikupas sebagian argumentasi majelis hakim terkait dengan pemaknaan tipu muslihat. Menurut mejelis hakim, perkataan "**tipu muslihat**" secara yuridis harus dimaknai tidak dalam arti picik, juga untuk lebih jelasnya secara etimologis kosa kata "tipu muslihat" itu harus didefinisikan sedemikian rupa. Kosa kata "**tipu muslihat**" berasal dari kata "tipu", yang artinya adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur, (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, padanannya adalah kata tipu daya, yang artinya adalah terutama, kecurangan yang merugikan orang lain. Kemudian berkembang menjadi kata

²⁴ Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Perdata Khusus Pada hari ini RABU tanggal 31 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema "Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim", hal. 2

tipu muslihat yang dalam peperangan diartikan siasat/strategi untuk memenangkan perang.

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut majelis hakim “ tipu muslihat “ bisa didefinisikan sebagai, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Karena majelis arbiter telah melakukan perbuatan tidak jujur, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh majelis arbiter patut dikategorikan sebagai perbuatan “ tipu muslihat “.²⁵

Indikator-indikator ketidakjujuran majelis arbiter dalam bertransaksi, menurut majelis hakim dapat dilihat dan simpulkan dari hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Termohon II (**PT. ATRIUMASTA SAKTI**) telah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam akta *al-murabahah* No.53/2005 pasal 3 ayat (10) yakni berupa IMB yang merupakan dokumen penting, yang dijanjikan sebelumnya selesai dalam hitungan bulan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang belum juga diselesaikan ;-
- b. Termohon II (**PT. ATRIUMASTA SAKTI**) telah ternyata mengabaikan persyaratan pasal 3 ayat (4) dan pasal 3 ayat (23) akta *al-murabahah*, yaitu berupa pembayaran biaya notaris dan tidak menyerahkan *self financing*.
- c. Termohon II (**PT. ATRIUMASTA SAKTI**) tidak beriktikad baik untuk menetralsir kegundahan Pemohon mengenai syarat-syarat yang diajnjikan itu terutama yang berkaitan dengan IMB dengan mencoba menghadirkan pelaksana jasa kontraktor H. Jayadi Kusumah, SH untuk hadir sebagai saksi dipersidangan BASYARNAS dalam upaya konfirmasi dan klarifikasi dari yang bersangkutan ;-
- d. Bahwa ternyata terhadap apa yang telah disimpulkan diatas oleh Termohon I sebagai Majelis Arbitrase tidak dipertimbangkan

²⁵ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 66-67

²⁶ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 73

Kemudian untuk memperkuat tafsir bahwa perkataan “tipu muslihat” itu bukan klaim dan monopoli ranah hukum pidana *ansich* tapi juga bisa ranah hukum perdata, majelis hakim di sini dapat mengemukakan penipuan dalam ranah hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 1321 KUHPerdata “Tiada sesuatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilapan atau diperoleh dengan paksaan atau “penipuan”. Lebih jauh pasal 1328 KUH Perdata menegaskan bahwa penipuan merupakan satu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.²⁷

Perkataan “tipu muslihat” dalam kepustakaan hukum islam lebih di kenal dengan istilah “Ghorror” bahkan dalam sebuah hadist Rasulullah SAW menyebutnya dengan istilah “Ghosysy” hal ini dikemukakan dalam kitab “Shubulussalam” Juz III kitabul Buyu’ ” yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah menginspeksi ke pasar di Madinah, beliau mendapatkan pedagang korma yang mencampuradukkan dagangannya yang kering dan yang basah dengan menyimpan yang basah dibawah dan yang kering diatas (untuk memperberat timbangan dan mengelabui konsumen), maka begitu hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda dengan mengancam:²⁸

❖ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)

Artinya : Dari abu huraira r.a berkata : sesungguhnya rosul saw melarang jual beli yang tidak jelas H.R riwayat muslim.²⁹

²⁷ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 65

²⁸ Ibid.

²⁹ Rowahu Muslim, *Balaqulmaron Sofakha*, h. 16. 176.

Barang siapa yang membasahi (kurmanya supaya lebih berat) maka sesungguhnya dia telah tidak transparan (menipu) dan barang siapa yang tidak transparan (menipu dalam transaksi) maka tidaklah dia masuk golonganku (bukan muslim); (ash-shon'any, subulussalam, TT, Dahlan, Bandung, Jilid III, hal 29).

Dalam bagian ini, penulis tidak akan melakukan penilaian terhadap kriteria atau indikator-indikator ketidakjujuran majelis arbiter yang dibangun oleh majelis hakim, sebab hal ini berkaitan dengan fakta persidangan dan penulis harus hadir disitu secara fisik dan berkelanjutan.

Analisis penulis dalam bagian ini hanya berkisar pada apakah tipu muslihat yang dijadikan sebagai dasar pengabulan permohonan pembatalan putusan Basyarnas oleh majelis hakim telah memiliki pijakan yuridis yang kuat dan tegas? Inilah yang akan penulis carikan jawabannya dalam diskusi pada bagian ini.

Pembatalan putusan Basyarnas patuh pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur pembatalan putusan badan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 70-72 di Bab VII tentang Pembatalan Putusan Arbitrase. Pasal 70, 71 dan 72 selanjutnya berbunyi sebagai berikut:³⁰

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

³⁰ Lihat Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 70 disebutkan:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan **putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pada hakikatnya penulis sepakat dengan majelis hakim terkait dengan pemaknaan tentang “tipu muslihat” yang tidak hanya sebatas klaim dan monopoli ranah hukum pidana *ansich* tapi juga bisa ranah hukum perdata, dan hukum syariah. Bagi penulis, majelis hakim telah mengeksplorasi makna

tipu muslihat secara radikal dalam berbagai perspektif, baik pidana, perdata maupun syariah dalam putusannya.

Namun penulis tidak sepakat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yang mengatakan bahwa:³¹

Perbuatan “ tipu muslihat ” yang terdapat dalam pasal 70 huruf C Undang-undang No. 30 Tahun 1999, bisa juga berkonotasi perdata, bahkan syari’ah, yang tentunya baik proses maupun akibatnya, harus melalui proses dan berakibat perdata pula, oleh karenanya klausula yang terdapat dalam penjelasan pasal 70 Undang-undang itu yang menyebutkan bahwa “ alasan-alasan permohonan pembatalan disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan ...” maka menurut Majelis Hakim putusan Pengadilan di sini adalah pengadilan yang memeriksa perkara itu yakni dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Bagi penulis, baik tipu muslihat itu dilihat dari segi perdata, pidana ataupun syari’ah, pengadilan yang berwenang untuk menetapkan ada tidaknya tipu muslihat tersebut tetap pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 di atas, bukan pengadilan agama. Majelis hakim menurut penulis khawatir dengan kompetensi hakim pengadilan negeri dalam menilai tipu muslihat yang berdimensi syari’ah. Kekhawatiran di sini menurut penulis tidak memiliki dasar sebab dalam proses berperkara, pengadilan bisa mendatangkan saksi ahli yang memiliki kemampuan khusus yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diselesaikan.

❖ اسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

Maka bertanyalah pada ahlinya jika kamu sekalian tidak mengetahuinya³²

³¹ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 66

³² Ayat/Azawajalah

Dari sini majelis hakim melakukan kesalahan fatal dengan mengabaikan amanat Pasal 70 C dan penjelasannya yang menyatakan :

Bahwa untuk dapat mempertimbangkan suatu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase harus **didukung bukti-bukti berupa putusan pengadilan terhadap alasan-alasan tersebut**. Dengan demikian, apabila permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak didukung putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata “harus” dalam norma hukum Pasal 70 di atas merupakan amar “perintah”, amar atau perintah menunjukkan makna wajib, alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase wajib dibuktikan adanya dengan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Akan tetapi dalam konteks kasus ini, fakta persidangan yang terekam dalam putusan No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, mengungkapkan bahwa alasan permohonan pembatalan putusan Basyarnas adalah karena tipu muslihat, namun alasan (tipu muslihat) tersebut tidak **didukung bukti-bukti berupa putusan pengadilan terhadap alasan tersebut (tipu muslihat)**, namun walaupun demikian, majelis hakim mengabulkannya, **padahal apabila permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak didukung putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**. Sebab alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan Basyarnas tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan penjelasan Pasal 70 UU No.30 tahun 1999.

Berdasarkan hal di atas, terlihat bahwa majelis hakim keluar dari aturan norma yang terdapat dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Majelis hakim keluar dari sumber hukum yang berupa undang-undang yang seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Padahal Dalam kepustakaan sumber hukum di Indonesia, undang-undang merupakan sumber hukum utama, dan bagi negara Indonesia sebagai salah satu penganut hukum civil/ system hukum Romawi-Jerman, ia tidak boleh keluar dari ketentuan yang ada dalam undang-undang sebab Negara penganut hukum civil beraliran *the legal positivisme/legisme*³³, dengan adagium tidak ada hukum selain hukum undang-undang.

Dalam *Roman Law Sistem* (istilah Prof. Satjipto Rahardjo; sistem hukum Romawi Jerman) menurut system hukum ini, UU merupakan sumber utama dan hakim tidak boleh membuat keputusan yang berbeda dengan UU. Di dalam Pasal 20 AB disebutkan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan UU,³⁴ dan ciri khusus dari *civil law* adalah hukum merupakan peraturan perundang-undangan.³⁵

Namun dengan demikian, pengadilan (hakim) dalam konteks ke Indonesiaan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya,³⁶ di aspek ini hakim wajib menggali hukum dengan berijtihad, akan tetapi hal ini bisa dilakukan apabila tidak ada aturan yang mengatur

³³ A. Qodri Azizi dkk, *Mengagas Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.x

³⁴ Ibid, hal. vii

³⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Penggubah Hukum*, hal. 34

³⁶ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

masalah yang sedang dihadapi, sementara dalam konteks persoalan yang sedang dikaji, menurut penulis ini bukan loading bagi hakim untuk mengerahkan daya isjtihadnya karena aturan hukumnya sudah jelas.

Penulis sepakat dengan pendapat kuasa hukum dari **PT. ATRIUMASTA SAKTI** yang mengatakan dalam bantahannya sebagai berikut:³⁷

Alasan permohonan pembatalan tipu muslihat yang diajukan oleh PEMOHON, tidak memenuhi syarat yang ditentukan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99

a. Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99 menyebut 3 (tiga) alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang terdiri dari:

a) ...

b) ...

c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

b. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99 menentukan syarat keabsyahan alasan-alasan tersebut

Penjelasan Pasal 70 tersebut mengatakan;

"...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang tersebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan"

c. Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99 dimaksud:

- Agar alasan permohonan pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON syah menurut hukum (*wettig, lawfull*), apakah alasan itu huruf a, b atau huruf c dalam kasus perkara ini putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase terhadap putusan Arbitrase A-quo merupakan hasil tipu muslihat dan tipu muslihat itu harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*gezaag van gewijsde, irrevocable judgement*).

- Apabila alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase A-quo yang diajukan oleh PEMOHON tipu muslihat tetapi tanpa didukung oleh alat bukti berupa putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka alasan tersebut tidak syah menurut hukum (*onwettig, unlawfull*).

d. Dalam perkara ini alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang dikemukakan PEMOHON pada angka III (halaman 4 s/d halaman 7) adalah tipu muslihat tanpa didukung dan

³⁷ Put.No.792/Pdt.G/2009/PA.JP, hal. 23-24

dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

- Berarti alasan ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase No.30/99.
- Dengan demikian alasan ini tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu alasan permohonan pembatalan angka III ini harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan diskusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan Basyarnas dengan alasan tipu muslihat, namun alasan (tipu muslihat) tersebut tidak didukung bukti-bukti berupa putusan pengadilan terhadap alasan tersebut (tipu muslihat), padahal apabila permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak didukung putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan Basyarnas tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan penjelasan Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Hakim telah keluar dari norma yang ada dalam Pasal 70 di atas.

Penulis juga mengkritik norma dalam UU No. 30 Tahun 1999, terutama Pasal 71 yang menyatakan:

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Limit waktu 30 (tiga puluh) hari yang disediakan oleh undang-undang di atas untuk digunakan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri, akan terasa sulit untuk diterapkan, sebab alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus

didukung dengan bukti putusan pengadilan ada tidaknya alasan-alasan tersebut.

Dalam hemat penulis, akan sangat sulit bagi pengadilan untuk menyelesaikan, menilai dan memutuskan tentang ada tidaknya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, mengingat kasus-kasus lain yang sedang dihadapi pengadilan juga banyak. Jadi bisa jadi alasan-alasan itu ada akan tetapi putusan pengadilannya keluar melebihi limit waktu yang telah disediakan.

Kata “harus” dalam norma hukum Pasal 71 di atas merupakan amar (perintah) yang menunjukkan makna “wajib”, dengan demikian jika lewat dari 30 (tiga puluh) hari, maka hak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase menjadi gugur secara otomatis.

Terhadap persoalan ini, penulis menawarkan solusi, yaitu merevisi UU No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 71 dengan menambah limit waktu pengajuan pembatalan putusan arbitrase, sehingga pihak-pihak memiliki banyak waktu untuk mengajukan ke pengadilan ada tidaknya atau sah tidaknya alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan pembatalan arbitrasenya, jika sah dengan dibuktikan putusan pengadilan alasan-alasan tersebut, ia juga punya waktu untuk mengajukan pembatalan arbitrase. Disamping itu, Mahkamah Agung juga bisa merekomendasikan agar pengadilan yang berada dibawahnya mensegerakan penyelesaian kasus ada tidaknya alasan-alasan pembatalan putusa arbitrase tersebut.